

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Intan Permatasari Nasution

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
intanpermatasari060989@gmail.com

Ahmad Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Article History:

Received: Agustus, 30, 2024
Accepted: September 27, 2024
Published: Oktober, 8, 2024

Abstract. *When it comes to education policy, the political situation is very important. The link between education and state politics is very strong because education educates its citizens to become useful and successful citizens. Politics and education are two important components of the socio-political structure of every country, both developed and developing. Often considered as different parts that are not related to each other. Although both play an important role in the process of creating the characteristics of a national society. Public policy is a highly complex, political, and analytical process that has no beginning or end point. There are times when the complex combination of factors known as policymaking produces an outcome called a policy. The first step in policy making is to find a general area, conduct analysis, set targets, decide on areas of implementation, negotiate and consult on political and societal aspects, and finally produce and implement a final policy. To avoid conflict and increase the chances of achieving organizational goals, effective policymaking involves agreeing on goals at all levels*

Keywords:

Public Policy, Politics, Islamic Education

Abstrak. Kebijakan pendidikan, situasi politik sangat penting. Keterikatan antara pendidikan dan politik negara sangat kuat karena pendidikan mendidik warganya untuk menjadi warga negara yang berguna dan berhasil. Politik dan pendidikan adalah dua komponen penting dari struktur sosial politik setiap negara, baik maju maupun berkembang. Seringkali dianggap sebagai bagian yang berbeda yang tidak berhubungan satu sama lain. Meskipun keduanya berperan penting dalam proses menciptakan ciri masyarakat nasional. Kebijakan publik adalah proses yang sangat kompleks, politis, dan analitis yang tidak memiliki titik awal dan akhir. Ada saat-saat ketika kombinasi faktor-faktor yang kompleks yang dikenal sebagai pembuatan kebijakan menghasilkan suatu hasil yang disebut kebijakan. Langkah pertama dalam pembuatan kebijakan adalah menemukan bidang umum, melakukan analisis, menyusun sasaran, memutuskan bidang pelaksanaan, bernegosiasi dan berkonsultasi tentang aspek politik dan masyarakat, dan akhirnya menghasilkan dan menerapkan kebijakan akhir. Untuk menghindari konflik dan meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi,

pembuatan kebijakan yang efektif melibatkan persetujuan sasaran pada semua tingkat.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting dalam situasi apa pun. Semuanya akan runtuh ketika pendidikan tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat. Oleh karena itu, semua orang harus setuju tanpa berdebat bahwa pernyataan pendidikan harus mendapat perhatian khusus. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang tepat harus dibuat untuk pendidikan, karena pendidikan adalah bagian penting dari keberlangsungan manusia.

Berbagai produk kebijakan telah dibuat seiring dengan kemajuan Indonesia, dengan proses pembuatan mereka tidak terpengaruh oleh proses politik. Sampai saat ini, proses perumusan kebijakan masih berlangsung, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini disusun dalam bentuk undang-undang yang ada dengan tujuan mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, serta Sila ke-4 dan Ke-5 dari Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Giantara & Amiliya, 2021).

Dalam bidang pendidikan, kebijakan muncul tidak terlepas dari masalah penting negara. Kebijakan ini muncul sebagai hasil dari perubahan yang terjadi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara, pendidikan adalah bagian penting dari proses pembangunan nasional. Adanya kebijakan pendidikan jelas bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara untuk maju dan sejajar dengan negara lain. Ini pasti sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa warga

Negara Indonesia harus diperkuat dalam bidang pendidikan untuk menjadi makmur dan berpengetahuan.(Yanti, 2020).

Sejak kemerdekaan, pendidikan di Indonesia telah berjalan dengan buruk (tidak sesuai dengan harapan). Selama periode orde lama (1945-1965), periode orde baru (1965-1998), dan periode reformasi (1998–sekarang), pendidikan nasional belum mencapai hasil yang diharapkan. Kegagalan: Kegagalan pendidikan di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya kerangka kerja pembangunan pendidikan nasional yang aspiratif, demokratis, dan partisipatif. Selain itu, tidak ada konsistensi dan kesinambungan dalam pelaksanaan rencana yang sudah ada, yang tidak tergantung pada masa jabatan menteri. Ini menunjukkan fakta bahwa pemerintah telah berganti lima kali. Dengan pergantian ini, kabinet yang menjabat juga berganti, yang secara otomatis menghasilkan kebijakan baru, seperti kebijakan pendidikan tentang kurikulum.(Ichsan, 2021).

Sebagai contoh, kurikulum telah diubah setidaknya dua kali sebelum Indonesia merdeka. Pertama, kurikulum diubah oleh penjajah belanda untuk memenuhi kepentingan politik, dan kedua, ketika Jepang menjajah Indonesia, kurikulum diubah untuk mendorong kemiliteran dan pembangunan Asia Timur Raya. Setelah Indonesia merdeka, pra orde baru, kurikulum telah diubah lagi, dengan rencana kurikulum yang dikeluarkan. Rencana pendidikan tahun 1964 membawa perubahan kedua. Dibuat karena merasa perlu untuk meningkatkan dan mengejar ketertinggalan dalam bidang tertentu, terutama matematika dan ilmu alam. Kurikulum telah berubah beberapa kali selama Orde Baru. Yang pertama adalah kurikulum 1968, yang dibuat karena tuntutan untuk mengubah pemerintahan orde lama dalam semua hal, termasuk pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum tahun 1975, yang disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977. Kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1984 menyebabkan perubahan ketiga. Perubahan keempat terjadi ketika Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaannya diberlakukan pada tahun 1989. Kurikulum harus dibuat

atau disusun sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya. (Jailani & Muhammad, 2019).

Dalam realitanya tidak ada negara di Bumi yang tidak ikut campur dalam pendidikan warganya. Dengan demikian, pendidikan juga memiliki potensi konflik, terutama ketika berusaha menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tidak mustahil bahwa pemerintah dan masyarakat saling berlawanan karena masyarakat ingin mewariskan kepentingannya sendiri kepada generasi berikutnya, dan pemerintah juga ingin mendidik rakyatnya dengan cara yang sesuai dengan ideologi pemerintah. Salah satu dari banyak konflik kepentingan yang terjadi antara keduanya adalah perselisihan tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum karena banyaknya kepentingan lembaga, masyarakat, dan politik. Kerena itu dibutuhkan pengaturan dalam hal ini sebuah kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang akan dibahas secara luas dalam tulisan ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis inductive deduktif yang berasal dari beberapa analisis literatur. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research) sebagai proses memahami data teks. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. Penulis kemudian menginterpretasikannya dengan menggunakan metode deskripsi analisis, dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis dan konsisten, yang menghasilkan interpretasi yang lebih baik dari teks. Data primer digunakan sebagai pelengkap dan penguat data yang dianggap valid, dan data sekunder terdiri dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan pendekatan kebijakan publik dalam politik pendidikan islam secara mendalam sesuai dengan kondisi yang dihadapi serta tujuan yang akan dicapai. Selain itu, kolaborasi antara

pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berdaya saing global. Penelitian ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik

Politik berasal dari kata Arab "Siyasyah", yang kemudian berubah menjadi "siasat" atau "politik" dalam bahasa Inggris. Mula-mula, kata politik berasal dari kata Yunani "Polis", yang berarti Negara Kota (city-state). Kata ini memiliki banyak turunan, seperti "polities", yang berarti warga negara dalam bahasa Inggris dan "políticos", yang berarti kewarganegaraan. Menurut genealogi kata politik tersebut, konsepsi politik berasal dari peradaban Yunani, tempat tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles hidup. Di mana para filosof menganggap politik sebagai upaya manusia untuk menciptakan tatanan hidup yang lebih baik. Politik dianggap sebagai tempat di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan mereka. (Asdrayany et al., 2023).

Menurut Peter Merkl, politik adalah upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Politik adalah upaya untuk membuat peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar orang dan meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Roger H. Soltau, politik terdiri dari pelajaran tentang negara, tujuannya, maksudnya, lembaga yang melaksanakannya, hubungan antara warga negaranya dan negara lain, dan artikulasi dan agregasi kepentingan. Kekuasaan adalah penting, menurut filsuf seperti Nietzsche. Kehidupan adalah keinginan untuk memiliki kuasa. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap politik sebagai upaya untuk mendapatkan kekuasaan atau bahkan sebagai cara untuk mengelolanya. Namun, beberapa definisi

yang menganggap kekuasaan sebagai esensi politik mengacu pada politik yang didasarkan pada kekuasaan. (Aliyah et al., 2023) Politik menunjukkan hubungan unik antara orang-orang yang hidup bersama; hubungan ini menghasilkan aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas, dan akhirnya kekuasaan. Pada dasarnya, politik memiliki ruang lingkup negara karena teori politik melihat negara sebagai lembaga politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Akibatnya, negara sedang bergerak.

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan penting untuk pertumbuhan anak. Untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi mungkin sebagai manusia dan anggota masyarakat, pendidikan menuntut segala kekuatan alam yang ada pada mereka. Jadi, politik pendidikan adalah semua kebijakan pemerintah suatu Negara tentang pendidikan, termasuk peraturan perundangan atau lainnya, yang digunakan untuk mengatur pendidikan untuk mencapai tujuan Negara. (Jailani & Muhammad, 2019).

Dalam konteks pendidikan politik, memiliki peran dan sangat penting bukan hanya sebagai pelengkap. Saat ini, orang masih percaya bahwa ekonomi dan politik adalah kunci kemajuan negara. Hal ini tercermin dari kecenderungan politik kita yang selalu berfokus pada dua bidang itu; hampir tidak ada politikus yang memprioritaskan sektor pendidikan sebagai bagian dari rencana politik mereka. Selain itu, hal ini terjadi dalam kehidupan nasional dan internasional kita. Kita masih memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi, politik hankam, dan politik luar negeri, dan belum pernah berbicara tentang memberikan prioritas yang lebih besar kepada sektor pendidikan.

Kebijakan publik adalah proses yang sangat kompleks, politis, dan analitis yang tidak memiliki titik awal dan akhir. Ada saat-saat ketika kombinasi faktor-faktor yang kompleks yang dikenal sebagai pembuatan kebijakan menghasilkan suatu hasil yang disebut kebijakan. Menurut Robert Eyestone, hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya didefinisikan dalam kebijakan publik. Pemerintah memiliki otoritas untuk

menetapkan kebijakan tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yang dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak tentang tujuan, prinsip, dan aturan strategis yang mengarahkan manajer dan staf dalam menentukan masa depan organisasi yang berdampak pada masyarakat.(Aliyah et al., 2023).

Dalam mempelajari kebijakan publik, para ahli bervariasi dalam definisinya, tetapi pada dasarnya mereka setuju: kebijakan, menurut Anderson, dikutip oleh Budi Winarno, adalah garis besar tindakan yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Amir Santoso mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari dua bidang: pertama, menyamakan kebijakan publik dengan tindakan pemerintah; bidang kedua, menganggap kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dan tujuan tertentu; dan bidang ketiga, menganggap kebijakan publik memiliki akibat yang dapat diprediksi.(Maghfiroh & Lestari, 2022) Dengan demikian, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa lembaga pemerintahan atau aktor yang memiliki legitimasi memberikan instruksi kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah kebijakan tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa perencanaan fenomena dan masalah yang muncul secara publik. Fenomena-fenomena ini memberikan pelaksana kebijakan jalan untuk mencapai tujuan dengan menyelesaikan masalah.

Carl J. Friderick mengatakan kebijakan adalah kumpulan tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan dan peluang untuk melaksanakan usulan kebijaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat dipahami bahwa kebijakan adalah sebuah rekomendasi untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai keputusan pemerintah, pengesahan

formal, program, keluaran, hasil akhir, teori atau model, atau proses. (Andi Cudai Nur & Muhammad Gruntur, 2019).

2. Proses Politik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Langkah pertama dalam pembuatan kebijakan adalah menemukan bidang umum, melakukan analisis, membuat sasaran, memutuskan bidang pelaksanaan, bernegosiasi dan berkonsultasi tentang aspek politik dan masyarakat, dan akhirnya membuat dan menerapkan kebijakan akhir. Untuk menghindari konflik dan meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi, pembuatan kebijakan yang efektif melibatkan persetujuan sasaran pada semua tingkat. Banyak ahli politik setuju bahwa proses pembentukan kebijakan adalah bagian penting dari sistem politik yang saat ini berfungsi. Proses politik yang efektif bergantung pada pembentukan kebijakan, yang kemudian diubah menjadi keputusan yang berkewenangan. (Yanti, 2020)

Kebijakan pemerintah pasti dibuat melalui proses ilmiah, seperti halnya kebijakan pendidikan yang mengatur persyaratan pendidikan agar dapat dilaksanakan. Untuk merumuskan kebijakan pendidikan secara sistematis, gunakan metode ini:

a. Munculnya Masalah dan Isu

Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan dan cara memecahkannya. Masalah kebijakan (publik) juga merupakan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang belum terpenuhi atau perbaikan yang hanya dapat dicapai melalui kebijakan publik. (Farkhan et al., 2022) Masalah dapat menyebabkan kegelisahan masyarakat karena ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Bermula dari masalah kecil hingga menjadi masalah besar yang menjadi perhatian publik, masalah ini menuai pro dan kontra yang berasal dari diskusi tentang ide, penjelasan, dan analisis masalah. Oleh karena itu, masalah seperti apakah pemerintah harus menetapkan peraturan tentang standar pendidikan dan tingkat kelulusan pada

dasarnya merupakan perbedaan pendapat tentang kualitas pendidikan. Selanjutnya, masalah ini hanyalah awal dari masalah publik di bidang pendidikan. Jika masalah ini menarik perhatian publik, hal itu akan membawa masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. (Tintigon et al., 2023) Siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, dan lembaga pendidikan dari tingkat kabupaten atau kotamadya hingga tingkat lebih tinggi, yaitu kementerian pendidikan semuanya menjadi perhatian publik terhadap kemajuan pendidikan secara keseluruhan dan khusus. Salah satu masalah yang sedang berkembang adalah kualitas pendidikan yang sangat buruk dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

Di bidang politik, dasar kebijakan publik dimulai dengan perumusan kebijakan, yang terdiri dari dua lapisan kelompok sosial: lapisan atas, atau elit, yang selalu mengatur; dan lapisan bawah, atau massa, yang selalu diatur. Peraturan pemerintah mencerminkan keinginan atau prinsip-prinsip elit yang berkuasa. Masyarakat tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan opini tentang masalah kebijakan utama. Administrasi dan birokrat hanya berfungsi sebagai mediator untuk proses informasi yang mengalir dari tingkat atas ke bawah. Kebijakan menjadi konservatif karena elit politik selalu ingin mempertahankan apa yang ada. Baik inkremental maupun trial and error, perubahan kebijakan hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

b. Pengagendaan

Pada titik ini, semua masalah yang sedang berkembang yang membahayakan kemaslahatan masyarakat mendapat perhatian publik dan pejabat yang berwenang. Para aktor yang memilih masalah dan masalah yang muncul yang layak untuk diidentifikasi lebih awal daripada masalah dan masalah lain yang sedang diperdebatkan untuk dimasukkan ke dalam pengagendaan kebijakan mencapai kesepakatan, dan konsekuensi konflik ini terjadi di antara elit politik itu sendiri.

Berbagai masalah yang sangat mendesak di kalangan masyarakat menjadi perhatian publik, baik melalui media massa maupun media cetak. Pejabat yang menangani masalah tersebut mengagendakan masalah-masalah tersebut, sehingga suatu masalah mungkin tidak disentuh dan yang lain menjadi perhatian karena kualitasnya.

c. Formulasi Kebijakan

Setelah masalah ditemukan, berlanjut ke proses yang sangat penting—perumusan kebijakan pendidikan. Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan berkaitan dengan menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai alternatif untuk masalah yang dikembangkan disepakati dan siapa yang terlibat. (Maimunah & Rosadi, 2021) Ini adalah prosedur yang khusus dirancang untuk menyelesaikan masalah khusus. Pada tahap formulasi, para perumus kebijakan mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah yang telah ditetapkan. Semua pihak yang berkepentingan bersaing untuk memberikan kontribusi mereka, sehingga para perumus kebijakan dapat membuat keputusan kebijakan yang akan diputuskan oleh lembaga legislatif atau peradilan. Pemerintah secara tidak langsung harus menerapkan kebijakan kepada unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Tahap terakhir evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah. (Kholifah et al., 2024)

3. Aktor-Aktor dalam Perumusan kebijakan Pendidikan

Peraturan seperti kebijakan pendidikan tidak dapat muncul dengan sendirinya. Simeon membagi lingkungan kebijaksanaan pendidikan menjadi dua kategori: lingkungan politik dan lingkungan nonpolitik. Dia percaya bahwa kedua lingkungan ini memengaruhi kebijakan, termasuk kebijaksanaan pendidikan. Kedua aktor menjelaskan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam sistem politik. David Easton adalah aktor

kebijakan publik. Penguasa di sini adalah orang yang terlibat dalam sistem politik setiap hari dan bertanggung jawab atas masalah ini. Mereka juga diakui oleh sebagian besar anggota sistem politik dan tindakan mereka dapat diterima dan mengikat untuk waktu yang lama selama penguasa menjalankan kewenangannya.

Ketika dia menjabat sebagai gubernur Arkansas dan kemudian sebagai presiden AS, Bill Clinton selalu melibatkan tiga aktor utama pemerintah, guru, dan pakar pendidikan dalam proses memutuskan kebijakan pendidikan secara sinergis. Aktor-aktor ini adalah (1) pemerintah, (2) guru, dan (3) pakar pendidikan, yang dia anggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah pendidikan di luar birokrasi.(Febriyani, 2021) Ini menunjukkan dengan jelas bahwa pengambilan keputusan kebijakan di Amerika Serikat sangat sinergis karena pihak-pihak yang berbeda memiliki keahlian di bidang pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk memahami perkiraan pasar pendidikan dan percepatan global. Berbeda dengan Indonesia, aktor yang ditetapkan oleh pemerintah adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di kalangan elit politik, tanpa melibatkan ahli pendidikan, meskipun elit politik mengambil keputusan. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek ketika mereka membuat kebijakan pendidikan.(Darsyah, 2020) Salah satu atribut yang dimaksud adalah:

- a) Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, tetapi lebih khusus lagi, tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b) Karena kebijakan pendidikan harus memenuhi aspek legal-formal, ia harus diakui dan secara sah berlaku di sebuah wilayah. Untuk melakukannya, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat konstitusional yang berlaku di wilayah tersebut. untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang sah.

- c) Untuk mencapai pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai, kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional. Ini adalah keharusan untuk memiliki kebijakan pendidikan sebagai panduan yang umum dan mendukung pengambilan keputusan.
- d) Kebijakan pendidikan harus minimal dibuat oleh administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan agar tidak berdampak negatif pada pendidikan atau lingkungan di luar pendidikan. Kebijakan harus dibuat oleh orang yang berwenang dan oleh para ahli di bidang tersebut.
- e) Jika kebijakan pendidikan dapat dievaluasi, situasi sebenarnya harus dipertimbangkan. Segala sesuatu yang baik harus dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan kesalahan harus diperbaiki. Jadi, kebijakan pendidikan harus memiliki ciri-ciri yang memungkinkan evaluasi yang mudah dan efisien.
- f) Kebijakan pendidikan harus diatur secara sistematis karena itu adalah sistem. Selain itu, sistem itu harus efektif, efisien, dan substansial agar kebijakan pendidikan tidak menjadi pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya karena banyak faktor yang hilang atau saling berbenturan. Untuk menghindari kecacatan hukum secara internal, hal ini harus diperhatikan dengan cermat. Selanjutnya, kebijakan pendidikan harus berinteraksi dengan kebijakan lainnya, termasuk kebijakan politik, kebijakan moneter, dan bahkan kebijakan pendidikan, baik di atas maupun di bawahnya.

James Anderson membagi nilai-nilai yang dapat membantu mengarahkan tindakan para pembuat keputusan ke dalam lima kategori: a) Nilai-nilai politik: keputusan dibuat berdasarkan keuntungan politik sebagai cara untuk mencapai tujuan partai atau kelompok kepentingan; b) Nilai-nilai organisasi: kepentingan organisasi seperti badan administrasi memberikan banyak imbalan untuk menerima usulan kebijakan yang ditawarkan atau menolak kebijakan

yang akan di berlakukan karena dapat merugikan organisasi tersebut; c) Nilai-nilai pribadi, yaitu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepentingan ekonomi, reputasi, atau posisi sejarah seseorang. Misalnya, ketika seorang politisi menerima suap untuk membuat keputusan tertentu, dan presiden mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi presiden pertama yang kalah perang, hal ini mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi seperti keinginan untuk dicatat dalam sejarah; d) Nilai-nilai kebijakan didasarkan pada kepentingan masyarakat atau kepercayaan tentang apa yang secara moral benar atau pantas untuk kebijakan publik, tetapi ini mungkin berarti bahwa lembaga legislatif harus siap untuk menghadapi resiko politik. e) Nilai-nilai ideologi didasarkan pada kepercayaan dan prinsip yang berhubungan secara logis yang merupakan pedoman bagi umat manusia.(rahman abdul, yusdayanti, nawir muhammad, 2022)

D. KESIMPULAN

Perumusan dan pelaksanaan keputusan politik adalah salah satu dari banyak bagian proses politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan cara perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kebijakan politik sebagai bentuk tindakan politik adalah istilah lain untuk keputusan politik. Peraturan dan perundang-undangan, yang merupakan bentuk kebijakan publik, membentuk keputusan politik penyelenggara negara. Sehingga proses politik diperlukan untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan publik juga dapat berasal dari isu yang muncul dan berkembang menjadi debat publik di berbagai forum sebelum disampaikan ke lembaga legislatif dan diproses menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik juga dapat berasal dari isu yang muncul dan berkembang menjadi wacana publik sebelum aspirasi pemerintah ditulis dalam peraturan pemerintah. Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini termasuk dalam kategori kebijakan publik.

REFERENSI

- Aliyah, J., Cholifah, M., Karoma, K., & Astuti, M. (2023). Konsep Dasar Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(5), 357–367. <https://jpk.joln.org/index.php/2/article/view/42/53>
- Andi Cudai Nur, & Muhammad Gruntur. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 165.
- Asdrayany, D., Najmi Muhajir, M., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. *Journal on Education*, 06(01), 6840–6852.
- Darsyah, S. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *At-Thullab: Jurnal Of Islamic Studies*, 1(1), 116–133.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Febriyani, A. N. (2021). Perumusan Kebijakan Di SMP Negeri 3 Patuk. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 1–7. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1745>
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 86–96.
- Ichsan, Y. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753>
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), 15–26. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Maghfiroh, N., & Lestari, A. D. (2022). *Politik pendidikan islam di indonesia. XVIII*, 23–30.
- Maimunah, M., & Rosadi, K. I. (2021). Faktro Yang Mempengaruhi Sistem

Menejemen Pendidikan Islam dalam kebijakan politi pendidikan Islam Di Indonesi. *Jimt: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(1), 249–265.

rahman abdul, yusdayanti, nawir muhammad, quraisy hidayah. (2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 132(1), 46–53.

Tintington, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>

Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>